

## PEMBERDAYAAN EKONOMI BERLANDASKAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

Muhibban<sup>1</sup>, Muhammad Misbakul Munir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor

\*Email koresponden: [afaafu123@gmail.com](mailto:afaafu123@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>

### ABSTRACT

*This study aims to explore economic empowerment within the framework of Islamic teachings, emphasizing the principle of masalah as its primary foundation. Through descriptive analysis and library research, the study highlights the central role of the masalah principle in regulating Islamic economics, ensuring collective welfare, justice, and balance within economic dynamics. Findings reveal that this principle forms the basis of Islamic economic law, encompassing financial transaction regulations, resource distribution, corporate social roles, and financial institution structures, with a focus on ethical values and social responsibilities. Masalah based economic empowerment not only pursues material growth but also contributes to social welfare, justice, and environmental sustainability, reinforcing the significance of implementing these values within Islamic economic practices.*

**Keywords:** Empowerment, economy, masalah.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemberdayaan ekonomi dalam konteks ajaran Islam, menitikberatkan pada prinsip masalah sebagai fondasi utama. Melalui analisis deskriptif dan riset perpustakaan, penelitian menyoroti peran sentral prinsip masalah dalam mengatur regulasi ekonomi Islam, menjaga kesejahteraan bersama, keadilan, dan keseimbangan dalam dinamika ekonomi. Hasil temuan mengungkap bahwa prinsip ini membentuk dasar hukum ekonomi Islam, meliputi regulasi transaksi keuangan, distribusi sumber daya, peran sosial perusahaan, dan struktur lembaga keuangan, dengan fokus pada nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial. Pemberdayaan ekonomi berbasis masalah tidak hanya mengejar pertumbuhan materiil, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan, mempertegas pentingnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik ekonomi Islam.

**Kata kunci:** Pemberdayaan, ekonomi, masalah.

### PENDAHULUAN

Penelitian ini memperlihatkan betapa pentingnya keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan Masalah. Pemberdayaan ekonomi dalam Islam tidak sekadar tentang mencapai tujuan finansial semata, melainkan lebih dalam lagi, tentang membangun sistem yang berorientasi pada kesejahteraan umat serta mempertimbangkan aspek sosial dan moral. Dalam kerangka hukum Islam, konsep Masalah, yang berarti kepentingan umum atau kesejahteraan, menjadi prinsip utama yang mengatur setiap tindakan ekonomi.

Pemahaman yang mendalam mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis Masalah dalam hukum Islam sangat penting. Hal ini tidak hanya relevan dalam konteks kesejahteraan ekonomi umat Muslim, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam menawarkan

alternatif bagi sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil secara global. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek yang luas, termasuk distribusi kekayaan, keadilan, tanggung jawab sosial, dan berbagai dimensi ekonomi yang melibatkan hubungan antarindividu dan masyarakat.

Pengenalan konsep Masalah dalam konteks ekonomi Islam memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama tersebut. Prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan yang diungkapkan dalam ajaran Islam menjadi landasan bagi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ajaran Islam juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam upaya membangun struktur ekonomi yang memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adanya gap antara teori dan praktik dalam penerapan konsep pemberdayaan ekonomi berlandaskan Masalah dalam masyarakat menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu dipecahkan. Pengkajian lebih lanjut terkait dengan implementasi nyata prinsip-prinsip ini dalam kehidupan ekonomi sehari-hari diperlukan agar bisa memberikan solusi konkret dalam memperbaiki sistem ekonomi yang ada. Oleh karena itu, penelitian yang menggali lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang dapat diaplikasikan secara efektif menjadi krusial.

Kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur sistem ekonomi juga menghadirkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah dan institusi keuangan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara efektif dalam kebijakan ekonomi mereka. Selaras dengan hal itu, penelitian yang mendalam akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran serta tanggung jawab institusi dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi berlandaskan Masalah dalam hukum Islam juga membawa implikasi penting dalam konteks globalisasi. Dalam era di mana ekonomi dunia semakin terhubung, prinsip-prinsip yang berakar dalam ajaran Islam dapat menawarkan landasan bagi sistem ekonomi yang lebih inklusif, mempertimbangkan keberagaman budaya, dan memperhatikan kepentingan umum secara global. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang pemberdayaan ekonomi berbasis Masalah juga memiliki relevansi dalam skala internasional.

Pentingnya penelitian ini juga tercermin dalam pengaruh yang dapat dimiliki oleh pengembangan model ekonomi yang memperhitungkan prinsip-prinsip Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif, akan ada kesempatan untuk mengimplementasikan strategi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, baik dalam skala lokal maupun global.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bersandar pada riset perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap referensi primer dan sekunder yang terkait dengan konsep pemberdayaan ekonomi dalam Islam berdasarkan prinsip masalah. Analisis yang cermat terhadap sumber-sumber ini menjadi inti dalam ekstraksi informasi esensial guna menghasilkan temuan yang tepat dan akurat. Referensi primer terdiri dari jurnal-jurnal terkini yang mendalami konsep masalah sebagai fondasi bagi pemberdayaan ekonomi, didukung oleh materi dari undang-undang, jurnal, buku, situs web, serta sumber

lain yang relevan dalam lingkup penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada pendekatan holistik terhadap referensi-referensi yang ada untuk mengeksplorasi korelasi antara teori ekonomi Islam yang berkaitan dengan masalah dan praktik pemberdayaan ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Masalah dalam Kerangka Fiqh Ekonomi Islam

Konsep masalah, dalam paradigma fiqh ekonomi Islam, merupakan prinsip fundamental yang mengatur hukum-hukum ekonomi dalam ajaran Islam. Masalah mengacu pada prinsip pemeliharaan kemaslahatan atau kepentingan umum yang menjadi pijakan bagi kebijakan serta praktik ekonomi dalam masyarakat Islam. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada pengejaran keuntungan materiil semata, namun juga memperhatikan kesejahteraan bersama, keadilan, dan keseimbangan dalam dinamika ekonomi. (Al Hadi, 2022)

Dalam konteks fiqh ekonomi Islam, masalah dianggap sebagai prinsip inklusif yang meliputi berbagai aspek kehidupan ekonomi, mulai dari transaksi keuangan hingga distribusi kekayaan. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, menghindari kerugian, dan memaksimalkan manfaat secara luas bagi individu maupun masyarakat. (Suar et al., 2020)

Secara ekonomis, prinsip masalah membentuk dasar bagi penetapan hukum-hukum ekonomi, termasuk namun tidak terbatas pada regulasi transaksi keuangan, keadilan dalam distribusi sumber daya, peran sosial perusahaan, serta kerangka kerja lembaga keuangan. Konsep ini juga memiliki implikasi moral yang kuat dalam setiap transaksi ekonomi, mendorong untuk menghindari praktik yang merugikan secara sosial atau individual.

Sebagai landasan filosofis dalam fiqh ekonomi Islam, masalah memberikan ruang bagi adaptabilitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memungkinkan ekonomi Islam untuk tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utamanya. (Muqorobin, 2008)

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, pemahaman yang mendalam terhadap konsep masalah menjadi krusial. Dengan menerapkan prinsip ini, pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama, kesejahteraan sosial, dan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep masalah dalam fiqh ekonomi Islam menjadi fondasi yang kokoh dalam merancang serta melaksanakan kebijakan ekonomi yang berlandaskan masalah. (Wikipedia, 2023)

### Maqasid al-Shariah dalam Konteks Ekonomi

Maqasid al-Shariah, yang mengacu pada tujuan atau maksud utama dalam ajaran Islam, membentuk landasan filosofis yang mengatur semua hukum dan prinsip dalam Islam. Dalam konteks ekonomi, Maqasid al-Shariah memiliki relevansi yang signifikan dalam mengarahkan upaya pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip masalah. Terdapat lima tujuan utama dalam Maqasid al-Shariah: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam lingkup ekonomi, tujuan-tujuan ini memberikan dasar yang kuat bagi kebijakan ekonomi yang sehat dan berkeadilan. (Lamido, 2016)

Penerapan Maqasid al-Shariah dalam konteks ekonomi Islam memberikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan social. Hal ini menekankan bahwa praktik ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam tidak hanya menyangkut aspek finansial semata, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan Maqasid al-Shariah mendorong kepada inklusi ekonomi yang merata, distribusi kekayaan yang adil, serta pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, penerapan Maqasid al-Shariah dalam ekonomi juga memberikan landasan bagi berbagai kebijakan, mulai dari pengaturan keuangan hingga perencanaan pembangunan ekonomi serta pendekatan dalam pengelolaan bisnis. (Roy Purwanto et al., 2022) Dengan memperhatikan tujuan-tujuan utama ini, sistem ekonomi dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menghindari ketimpangan ekonomi yang merugikan, serta menjaga kesinambungan lingkungan dan sumber daya alam.

Kesimpulannya, penerapan Maqasid al-Shariah dalam konteks ekonomi Islam memberikan fondasi yang kokoh bagi pemberdayaan ekonomi yang didasarkan pada prinsip masalah. Memahami tujuan-tujuan utama ini menjadi krusial dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan umum. (Mergaliyev et al., 2021)

### **Nilai-nilai Etis dalam Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi yang mengambil pijakan pada prinsip masalah dalam Islam tidak semata-mata terpaku pada aspek praktis dan keuntungan materiil. Etika yang berlandaskan pada nilai-nilai moral menjadi landasan yang kuat dalam mengarahkan aksi dan keputusan di ranah ekonomi. Dalam konteks ini, Islam menekankan prinsip-prinsip etika yang menjadi pedoman bagi setiap tindakan ekonomi. Salah satu nilai utama yang ditekankan dalam konteks ini adalah keadilan. Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang berakar pada prinsip masalah harus mengintegrasikan prinsip ini, memastikan distribusi yang adil dari sumber daya serta peluang ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat tanpa pengecualian. (Jajang et al., 2021)

Selain keadilan, nilai-nilai seperti transparansi, kejujuran, dan integritas juga menjadi dasar dalam pemberdayaan ekonomi berlandaskan masalah. Prinsip-prinsip ini menegaskan urgensi untuk melaksanakan transaksi dan bisnis dengan jujur, tanpa menyembunyikan informasi atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Pentingnya kesadaran akan tanggung jawab sosial juga merupakan nilai etis yang signifikan dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Islam menegaskan pentingnya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara umum, bukan semata untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Inisiatif yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan menjadi cermin dari nilai-nilai etis ini. (Maulidina, 2019)

Aspek etika dalam pemberdayaan ekonomi juga mencakup nilai-nilai seperti keberlanjutan lingkungan. Islam memberikan ajaran tentang tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan sekitar, menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijak demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

Secara kesimpulan, nilai-nilai etika memegang peran yang krusial dalam pemberdayaan

ekonomi yang berlandaskan masalah dalam Islam. Implementasi nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara materiil, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan. (Suminar, 2022)

### **Implementasi Prinsip Masalah dalam Sistem Keuangan**

Prinsip masalah dalam Islam memiliki peran sentral dalam perancangan dan pengaturan sistem keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai etis dan prinsip keadilan. Implementasi prinsip ini menjadi krusial dalam pembentukan landasan yang kokoh bagi sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kerangka sistem keuangan Islam, prinsip masalah menjadi panduan dalam pembentukan instrumen keuangan yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial semata, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. (Qorib & Harahap, 2016)

Prinsip masalah juga memberikan pengaruh pada regulasi dan pengawasan dalam sistem keuangan Islam. Regulasi yang berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, serta keamanan dalam transaksi keuangan. Tak hanya itu, prinsip masalah juga memiliki dampak pada kebijakan pembangunan ekonomi yang berfokus pada inklusi keuangan. Memastikan akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas dalam implementasi prinsip ini. (Suminar, 2022)

Penerapan prinsip masalah dalam sistem keuangan juga memberikan dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga keuangan yang memahami serta menginternalisasi nilai-nilai etis dalam setiap langkah mereka. Lebih dari sekadar mencari keuntungan, lembaga-lembaga ini berperan sebagai pemangku kepentingan utama dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi ekonomi dan kemaslahatan umum. (Harun, 2022)

Secara keseluruhan, implementasi prinsip masalah dalam sistem keuangan menegaskan pentingnya membangun sistem yang tidak hanya terfokus pada keuntungan finansial, melainkan juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini membawa dampak positif dalam menjaga stabilitas, keadilan, serta keberlanjutan sistem keuangan Islam. (Aminullah, 2021)

### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pemberdayaan Ekonomi**

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memegang peran sentral dalam kerangka pemberdayaan ekonomi dalam Islam. CSR bukan semata tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang sumbangan positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi yang berdasarkan masalah, CSR menjadi alat bagi perusahaan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Perusahaan yang berpegang pada prinsip pemberdayaan ekonomi berbasis masalah memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan pemegang saham semata, tetapi juga terhadap seluruh ekosistem sosial. Ini meliputi keterlibatan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat sekitar, memberikan sumbangan positif dalam penciptaan lapangan kerja, serta menyediakan layanan yang berdampak pada kesejahteraan umum. (Achmad, 2023)

Pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan masalah juga menekankan pentingnya keadilan dan distribusi yang merata. Dalam konteks ini, CSR dapat menjadi instrumen untuk menciptakan kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi beragam lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan atau kurang beruntung.

Perusahaan yang menerapkan CSR dalam kerangka pemberdayaan ekonomi juga memberikan prioritas pada keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas operasionalnya. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai etis dalam Islam yang menekankan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, perusahaan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kelangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang. (Qorib & Harahap, 2016)

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, perusahaan juga dapat menjadi agen perubahan sosial yang positif melalui kegiatan CSR. Program-program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat menjadi langkah konkret yang diambil perusahaan untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya.

Secara menyeluruh, tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis masalah memegang peranan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Prinsip ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menjadi entitas ekonomi semata, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang memperhatikan kepentingan bersama. (Elvira, 2018)

### **Pendidikan Ekonomi dan Pemberdayaan Manusia**

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, pendidikan ekonomi memegang peran penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam, nilai-nilai etis, dan praktik-praktik ekonomi yang berlandaskan masalah. Ini memberikan kesempatan bagi individu untuk memahami, menginternalisasi, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam transaksi bisnis maupun dalam pengambilan keputusan ekonomi pribadi. (Suminar, 2022)

Pendidikan ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan manusia juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan pemahaman yang luas terkait sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup pemahaman terkait manajemen keuangan yang bijaksana, kewirausahaan, serta pemahaman akan bagaimana ekonomi dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selain aspek praktis, pendidikan ekonomi juga memegang peran penting dalam membentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap masalah ekonomi dan sosial. Ini membantu individu untuk memahami implikasi dari setiap keputusan ekonomi yang diambilnya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mendorong mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab. (Jajang et al., 2021)

Pendidikan ekonomi juga berpotensi menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, peran pendidikan ekonomi memiliki dampak signifikan dalam pemberdayaan manusia dalam konteks ekonomi berlandaskan masalah dalam Islam. Dengan memberikan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran yang luas mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, pendidikan ekonomi berperan sebagai pondasi utama dalam membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing ekonomi yang berkelanjutan. (Jaelani, 2014)

### **Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai Akar Pemberdayaan Ekonomi**

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memainkan peranan yang penting dalam upaya

pemberdayaan ekonomi sesuai dengan prinsip masalah dalam Islam. UMK seringkali menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi masyarakat, dengan memberikan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta menyediakan barang dan jasa yang merupakan komponen vital dalam ekosistem ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, UMK memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan bagi masyarakat. Pemberdayaan UMK yang berlandaskan masalah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah melalui pemberian akses yang terjangkau dan berkelanjutan terhadap pendanaan bagi UMK. (Utama, 2020)

Keuangan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan dan keberkahan, sering menjadi pilihan yang tepat dalam mendukung pertumbuhan serta pengembangan UMK. Selain itu, pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMK juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi mereka. Peningkatan pengetahuan terkait manajemen usaha, keuangan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai akan membantu UMK bertahan dan tumbuh dalam lingkungan pasar yang kompetitif. (Jaelani, 2014)

Peranan UMK dalam pemberdayaan ekonomi juga memerlukan dukungan kebijakan yang mendukung. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan UMK, termasuk regulasi yang memperhatikan kelangsungan usaha, bantuan teknis, serta insentif yang mendorong perkembangan UMK secara berkelanjutan. Dengan memperkuat peran UMK dalam pemberdayaan ekonomi, masyarakat akan dapat menikmati manfaat yang lebih luas, seperti inklusi ekonomi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang merata, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. (Jajang et al., 2021)

### **Keuangan Syariah sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi**

Keuangan Syariah telah menjadi solusi yang dicari-cari dalam upaya pemberdayaan ekonomi berdasarkan masalah dalam Islam. Prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan telah terbukti menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu karakteristik utama dari keuangan Syariah adalah larangan terhadap riba atau bunga. Prinsip ini memastikan bahwa dalam transaksi keuangan, tidak ada bunga yang dikenakan, sehingga membuka pintu bagi pembiayaan yang lebih adil dan menjaga keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini memungkinkan adanya akses pembiayaan yang lebih merata dan berkelanjutan, terutama bagi segmen masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan.

Prinsip profit-and-loss sharing atau bagi hasil dalam keuangan Syariah, seperti mudharabah dan musharakah, juga berperan dalam memberikan kesempatan kepada individu atau usaha mikro kecil untuk mendapatkan akses pendanaan tanpa membebani mereka dengan beban bunga. Prinsip ini membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk berbagi risiko dan manfaat secara adil. (Muheramtohad, 2017)

Di samping itu, konsep keuangan mikro Syariah, seperti Qard al-Hasan atau pinjaman tanpa bunga, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih bersahabat bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini memberikan kesempatan akses terhadap dana darurat atau modal usaha tanpa adanya beban tambahan dalam bentuk bunga.

Keuangan Syariah juga memainkan peran penting dalam pengembangan instrumen-instrumen keuangan yang lebih berkelanjutan, seperti sukuk atau obligasi Syariah yang didukung oleh aset riil dan mendorong investasi yang berkelanjutan dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, keuangan Syariah memberikan solusi yang berkelanjutan dengan menggabungkan prinsip-prinsip etis dan ekonomi yang mendukung kepentingan bersama. Dengan memberikan akses layanan keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, keuangan Syariah telah membuktikan peranannya sebagai solusi yang efektif dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi dalam kerangka masalah Islam. (Qorib & Harahap, 2016)

### **Inklusi Keuangan: Aksesibilitas bagi Pemberdayaan**

Inklusi keuangan menjadi pilar utama dalam upaya pemberdayaan ekonomi yang merata dan inklusif. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya sulit atau tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi berlandaskan masalah dalam Islam, inklusi keuangan menjadi jalan untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini memungkinkan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan seperti UMK, perempuan, dan individu dengan pendapatan rendah, untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Inklusi keuangan dalam konteks ini tidak hanya tentang pemberian akses, tetapi juga tentang memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip keuangan Syariah. Ini melibatkan pengembangan produk-produk keuangan yang ramah Syariah, seperti tabungan tanpa bunga, pembiayaan mikro yang adil, dan layanan keuangan yang berkelanjutan. Selain itu, inklusi keuangan melibatkan edukasi dan pemahaman yang lebih baik terhadap layanan keuangan bagi masyarakat. Pendidikan keuangan yang mencakup prinsip-prinsip keuangan Syariah memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana. (Suminar, 2022)

Inovasi teknologi juga berperan besar dalam meningkatkan inklusi keuangan. Fintech dan layanan keuangan berbasis teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah, terjangkau, dan cepat terhadap layanan keuangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan keuangan konvensional. (Muheramtohad, 2017)

Dengan mengembangkan inklusi keuangan, masyarakat dapat merasakan manfaat dalam bentuk peningkatan kegiatan ekonomi, pemutusan siklus kemiskinan, serta meningkatnya stabilitas keuangan dan sosial. Ini tidak hanya menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

### **Tantangan Implementasi Prinsip Masalah dalam Praktik Ekonomi**

Implementasi prinsip masalah dalam praktik ekonomi, meskipun berakar pada nilai-nilai etis yang jelas dalam Islam, seringkali menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi penerapannya secara menyeluruh dan efektif. Salah satu tantangan utamanya adalah variasi penafsiran terhadap konsep masalah itu sendiri. Arti dari masalah dapat dipersepsikan secara berbeda bergantung pada konteks dan perspektif. Hal ini bisa menciptakan perbedaan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber dari

masalah dalam kebijakan ekonomi atau keputusan bisnis.

Di samping itu, konteks global dan dinamika pasar juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip masalah. Pasar yang kompetitif dan tekanan ekonomi seringkali menghambat penerapan prinsip-prinsip etis dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama jika hal tersebut berlawanan dengan keuntungan finansial yang instan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip masalah juga menjadi hambatan dalam implementasinya. Ketika individu, perusahaan, atau bahkan regulator tidak sepenuhnya memahami nilai-nilai serta implikasi dari prinsip masalah, penerapannya dalam praktik ekonomi dapat terbatas atau bahkan diabaikan. (Hakiem Ajuna, 2019)

Ketidakseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan kepentingan bersama juga menjadi tantangan. Dalam beberapa situasi, keuntungan individu atau kelompok dapat bertentangan dengan masalah secara keseluruhan, menyulitkan pengambilan keputusan dalam mencapai keseimbangan yang tepat. Namun, di tengah berbagai tantangan ini, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sedang dilakukan. Pendidikan yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan masalah tengah berkembang, sementara peran pendidikan terus ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam.

Tak hanya itu, keterlibatan dalam dialog dan kerjasama antara pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat menjadi krusial untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan secara bersama. Kesimpulannya, meskipun tantangan dalam implementasi prinsip masalah dalam praktik ekonomi ada, langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman, membuka dialog terbuka, dan mengadopsi pendekatan kolaboratif menjadi kunci untuk mencapai penerapan yang lebih luas dan efektif dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berakar pada masalah. (Wulan, 2022)

### **Prospek Masa Depan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masalah**

Pemberdayaan ekonomi berlandaskan masalah dalam Islam menjanjikan prospek cerah bagi masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil. Konsep ini membentuk fondasi yang kokoh untuk membangun ekosistem ekonomi yang tidak hanya memprioritaskan keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial secara holistik. (Sri et al., 2010) Salah satu prospek utamanya adalah:

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbasis masalah: Pendidikan serta penyuluhan yang lebih luas mengenai nilai-nilai etis, keadilan, dan prinsip masalah diharapkan mampu meningkatkan pemahaman di kalangan individu, lembaga keuangan, perusahaan, serta masyarakat umum.
2. Kemajuan dalam teknologi: Fintech, layanan keuangan digital, dan inovasi teknologi lainnya memiliki potensi untuk memberikan akses yang lebih luas dan terjangkau terutama bagi daerah terpencil atau masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan konvensional. (Rusdiana et al., 2013)
3. Pertumbuhan sektor keuangan Syariah: Pengembangan instrumen keuangan yang lebih berkelanjutan, seperti sukuk proyek, investasi sosial yang berdampak, dan produk keuangan mikro yang lebih bersahabat, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
4. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara: Kerjasama antara lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat menciptakan ekosistem yang mendukung dan memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis masalah di tingkat

lokal, nasional, maupun global.

Secara keseluruhan, prospek masa depan pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan masalah menjanjikan perkembangan yang lebih baik dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan peningkatan pemahaman, dukungan teknologi, inovasi keuangan, serta kolaborasi yang solid, prospek ini membawa harapan akan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat. (Octavia Habie, 2022)

### **Rekomendasi dan Langkah-langkah Kebijakan**

Langkah-langkah kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis masalah dalam Islam memerlukan adopsi kebijakan yang mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berkeadilan. Beberapa rekomendasi dan langkah-langkah kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi (Wulan, 2022):

#### 1. Pendidikan dan Kesadaran:

- a) Integrasi Kurikulum: Inklusi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai masalah dalam kurikulum pendidikan formal untuk memperluas pemahaman masyarakat sejak usia dini terhadap aspek-aspek penting ini.
- b) Peningkatan Kesadaran: Kampanye edukasi dan pelatihan yang melibatkan masyarakat umum dan pelaku bisnis tentang manfaat serta prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi berbasis masalah.

#### 2. Inklusi Keuangan dan Aksesibilitas:

- a) Fasilitasi Akses: Perluasan akses ke layanan keuangan berbasis masalah dengan pemanfaatan teknologi guna mencakup wilayah-wilayah terpencil dan kelompok-kelompok yang kurang terlayani.
- b) Insentif dan Regulasi: Dukungan terhadap insentif pajak atau regulasi yang mendukung lembaga keuangan Syariah dan usaha yang berbasis prinsip masalah untuk memperluas layanan keuangan yang sesuai. (Hakiem Ajuna, 2019)

#### 3. Pengembangan Instrumen Keuangan:

- a) Inovasi Keuangan Syariah: Dorongan untuk mengembangkan instrumen keuangan berbasis masalah yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat, seperti sukuk proyek yang mendukung infrastruktur.
- b) Pemberdayaan Usaha Kecil: Dukungan khusus dan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan prinsip bagi hasil yang lebih merata. (Marwah et al., 2018)

#### 4. Kolaborasi dan Kemitraan:

- a) Kerjasama Lintas-sektor: Mendorong kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan inisiatif pemberdayaan ekonomi berbasis masalah yang komprehensif.
- b) Pendekatan Terpadu: Pembuatan kebijakan yang menyeluruh dan terpadu untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya mengedepankan aspek finansial, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Langkah-langkah ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, pelaku bisnis,

lembaga keuangan, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis masalah. Kebijakan inklusif dan berkelanjutan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat secara keseluruhan. (Peristiwo & Hadi, n.d.)

## SIMPULAN

Dalam kerangka fiqh ekonomi Islam, konsep masalah yang merupakan muara maqasid al-shariah beserta nilai-nilai etis, dan prinsip pemberdayaan ekonomi saling terkait untuk membentuk fondasi yang kuat dalam mengatur praktik ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Prinsip Masalah memberikan pijakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama, sementara Maqasid al-Shariah mengarahkan pada tujuan utama yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi yang merata. Sementara itu, nilai-nilai etis membentuk landasan moral dalam praktik ekonomi, dan prinsip pemberdayaan ekonomi menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, pendidikan ekonomi yang inklusif, serta aksesibilitas keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ini ada, prospek masa depan menjanjikan kemajuan yang signifikan dalam menciptakan ekonomi yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan di dalam paradigma ekonomi Islam yang berlandaskan Masalah.

## REFERENSI

- Achmad, W. (2023). Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4367–4380.
- Al Hadi, M. Q. (2022). Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: an Overview of Islamic Economics. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 16. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010>
- Aminullah, A. (2021). Urgensi Masalah dalam Pengembangan Hukum Islam. 2(2), 67–88.
- Elvira, S. D. (2018). Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan. *International Journal of Physiology*, 6(1), 2018.
- Hakim Ajuna, L. (2019). Masalah Mursalah Implementasinya pada Transaksi Ekonomi. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 170–192.
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Jaelani, D. I. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi). *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah Bisnis Islam*, 1(1), 18–34.
- Jajang, A., Mahri, W., Cupian, J., Nur, M., Al Arif, R., Arundina, T., & Widiastuti, T. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam.
- Lamido, A. A. (2016). Maqasid al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 27–49. <https://doi.org/10.12816/0036594>
- Marwah, S. S., Syafe'i, M., & Sumarna, E. (2018). Relevansi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara Dengan Pendidikan Islam. *TARBAWY : Indonesian Journal of Islamic Education*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.17509/t.v5i1.13336>
- Maulidina, H. (2019). Implementasi prinsip Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat pessipektif masalah (studi di 212 mart bangil). 2, 1–13.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. In *Journal of Business Ethics* (Vol. 170, Issue 4). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95.

- <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Muqorobin, M. (2008). Journey of Islamic Economics in the Modern World. Proceedings of The Seventh International Conference on Islamic Economics, 385–404. [https://www.kau.edu.sa/Files/121/Researches/56941\\_27257.pdf](https://www.kau.edu.sa/Files/121/Researches/56941_27257.pdf)
- Octavia Habie, R. (2022). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Principles Management and Business*, 1(01), 8–17. <https://doi.org/10.55657/jpmb.v1i01.48>
- Peristiwo, H., & Hadi, A. (n.d.). Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. 59–68.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5, 55–80.
- Roy Purwanto, M., Supriadi, S., Sularno, S., & Rokhimah, F. (2022). The Implementation of Maqasid Al-Sharia Values in Economic Transactions of The Java Community. *KnE Social Sciences*, 2022, 120–129. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11351>
- Rusdiana, S., Adawiyah, C. R., Raya, J., & Kav, P. (2013). Analisis Ekonomi Dan Prospek Usaha Tanaman Dan Ternak Sapi Di Lahan Perkebunan Kelapa. 10(1), 118–131.
- Sri, M., Widayat, P., & Lubis, N. (2010). Prospek Ekonomi Indonesia: Perspektif Makroekonomi. *Suara Merdeka*, 20(3), 146–155.
- Suar, A., Meirison, M., & Nazar, Z. (2020). Islamic Economic Redefinition and its Methodology Among Contemporary Thinkers. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 1(1), 7–17. <https://doi.org/10.30984/kijms.v1i1.3>
- Suminar, A. C. (2022). Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. <https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/>
- Utama, A. S. (2020). Pemanfaatan program CSR perusahaan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat Kabupaten Pelalawan di masa pandemi Covid-19. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 77–83. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.77-83>
- Wikipedia. (2023). Islamic economics. [https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic\\_economics](https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_economics)
- Wulan, D. R. (2022). Konsep Mashlalah dalam Ekonomi Islam. *EBISA: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 00(00). <https://jurnal.stebismu-sumedang.ac.id/index.php/EBISA/article/view/4%0Ahttps://jurnal.stebismu-sumedang.ac.id/index.php/EBISA/article/download/4/4>